

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya

Rusnywaty Yalensy Nines¹, Drs. Supri Hartono², M.S, Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.S³
ninefrusny@gmail.com¹, suprihartono@untag-sby.ac.id², didin@untag-sby.ac.id³

Program Studi Administrasi Public, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Keywords: Role, Policy, Environmental Service

Abstract

Operational standard regulations that have been stipulated at the Surabaya City Environment Service, namely by considering that in order to realize the implementation of public services in accordance with the principles of good governance, and in order to realize certainty of the rights and obligations of various parties related to service delivery, every public service provider must set service standards. And in order to provide a reference in assessing performance measures and the quality of service delivery in question, it is necessary to stipulate service standards for the Environmental Service with a Decree from the Head of the Environmental Service. To measure the role of the Environmental Service, the role theory of Iyas Yusuf is used as a basis for analyzing the implementation carried out by the Environmental Service. This research uses a type of qualitative research in the form of descriptive. The results obtained from this study indicate that the Environmental Service government has implemented TUPOKSI in accordance with Regional Regulation No. 1 of 2019 concerning Waste Management and Cleanliness, but in research it was found that the policies implemented by the Environmental Service were in accordance with applicable procedures, the government also used several ways that are considered effective, namely by socializing, community service and implementing waste management with the method (Reduce, Reuse, Recycle) are the intentions of handling waste which consists of three elements, namely, "Reduce", "Reuse" and "Recycle" waste (known as the 3R).

Kata kunci : Peran, Kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup

Abstrak

Regulasi standar operasional yang telah ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yaitu dengan mempertimbangkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang

baik, serta untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak. Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan standar pelayanan. Dan untuk memberikan acuan dalam menilai ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, perlu ditetapkan standar pelayanan untuk Dinas Lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mengukur peran Dinas Lingkungan Hidup, digunakan teori peran Iyas Yusuf sebagai dasar untuk menganalisis implementasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah menerapkan TUPOKSI sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, namun dalam penelitian ditemukan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. prosedur, pemerintah juga menggunakan beberapa cara yang dianggap efektif yaitu dengan sosialisasi, pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakan pengelolaan sampah dengan metode (Reduce, Reuse, Recycle) adalah niat penanganan sampah yang terdiri dari tiga unsur yaitu "Reduce". , "Reuse" dan "Recycle" limbah (dikenal sebagai 3R).

Pendahuluan

Masalah lingkungan saat ini merupakan masalah yang sangat kompleks dimana lingkungan saat ini sangat bergantung pada cara hidup manusia, Hal-hal yang semakin lama semakin menurun baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Kondisi lingkungan juga semakin memusingkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah ditambah

dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Masalah lingkungan saat ini yang sulit untuk diatasi adalah masalah sampah. Limbah dibuang atau dibuang bahan yang, sebagai akibat dari aktivitas manusia atau alam, telah kehilangan unsur-unsur penting atau fungsi utamanya dan tidak lagi dapat digunakan. Semua aktivitas manusia menghasilkan limbah atau produk limbah. Sumber sampah biasanya berasal dari tempat atau lingkungan seperti rumah, pertanian, perkantoran, pasar, pabrik,

rumah sakit, dll. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan konsumsi manusia terhadap barang atau bahan yang digunakan sehari-hari (Sejati, 2013).

Saat ini sampah seolah disepelekan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, namun sampah ini juga memiliki banyak dampak negatif yang dapat terjadi atau dampak buruk yang ditimbulkan. Sebuah model adalah Degradasi Lingkungan. Produksi sampah meningkat di Indonesia sebagai akibat dari jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan juga yang relatif cukup cepat. Kebiasaan konsumsi juga berperan dalam munculnya berbagai bentuk sampah, termasuk kemasan. Bahan limbah yang sangat sulit terurai membutuhkan waktu ribuan tahun untuk hancur.

Saat ini, negara berkembang seperti Indonesia masih harus berjuang keras untuk menangani masalah sampah. Kegiatan pengelolaan sampah untuk mengurangi penumpukan sampah yang dapat mengganggu kenyamanan penduduk setempat (Pradana & Nugroho, 2018).

Teori peran digunakan oleh peneliti untuk memahami penelitian ini. Sebuah pendekatan yang awal guna mengatasi masalah sampah yaitu dengan membuat peningkatan kesadaran dari kelompok masyarakat akan pentingnya pengelolaan

sampah melalui teori pembagian peran. Tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini adalah untuk mengetahui peran dinas lingkungan dalam mensosialisasikan kesadaran pengelolaan sampah.. Standar dan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Menurut Iyas Yusuf (2014:05) dalam (Hadya, 2020)), peran pemerintah dalam perspektif pemberdayaan dan penguatan, tepatnya mengarahkan wilayah lokal menuju kemandirian dan perbaikan untuk menghasilkan kelimpahan, tidak benar-benar ditanggung oleh wilayah lokal. Membangun daerah setempat membutuhkan pekerjaan pemerintah yang ideal dan mendalam. Oleh karena itu, peran pemerintah yang dimaksud meliputi:

- a. Pemerintah sebagai Regulator
- b. Pemerintah sebagai Dinamisator
- c. Pemerintah sebagai Fasilitator.

Metode penelitian

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dijadikan sebagai tempat penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi, dan penelitian berlangsung selama satu bulan. Dalam ulasan ini, pencipta menggunakan semacam pemeriksaan subyektif dengan metodologi yang jelas. Di lapangan, bukti

nyata diberikan melalui penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dengan metodologi memukau merupakan tahapan yang dilakukan untuk menggambarkan realitas atau keadaan atau kondisi yang muncul dalam masalah yang diteliti. Dhanim (2002) mengatakan bahwa kualitatif juga mengacu pada konstruktivisme, yang mengatakan bahwa realitas memiliki banyak dimensi interaktif yang berbeda. Ini juga dapat diartikan sebagai upaya untuk berbagi pengalaman sosial yang ditentukan oleh penelitian. Akibatnya, data deskriptif dapat dihasilkan dan diolah dalam penelitian kualitatif. B. Dalam proses menyusun pedoman, wawancara, dan dokumen, kami membuat asumsi bahwa kebenaran itu cair dan dapat ditemukan dengan mempelajari individu melalui interaksi tertulis atau situasi sosial mereka. (Salmaa, 2021).

Pembahasan

Kebijakan Publik Menurut Yohan (2017), Pemerintah dalam mengembangkan kebijakan publik untuk mengatur masyarakat dan memastikan bahwa warga negara mematuhi kebijakan tersebut. Para ahli berusaha mendefinisikan kebijakan publik dari berbagai perspektif melalui berbagai definisi. Definisi ini masing-masing dijelaskan secara terpisah dalam

topik ini. Definisi yang berbeda ini menunjukkan hubungan yang sangat nyaman antara masalah pemerintahan dan organisasi negara, memecahkan pembagian organisasi masalah pemerintah yang tercermin dalam hubungan kausal antara strategi terbuka dan organisasi, meskipun faktanya memiliki kesamaan dan kontras. kepentingan masyarakat di daerah setempat

Dengan mempelajari paradigma ilmu administrasi dapat dilihat bagaimana ilmu kebijakan publik menjembatani kesenjangan antara kedua bidang ilmu tersebut. Penelitian kebijakan publik tidak lepas dari perkembangan paradigma administrasi karena perkembangan ilmu kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan perkembangan ilmu kebijakan publik yang berkaitan dengan ilmu politik. Model strategi publik lebih mudah dipelajari ketika disibukkan dengan dunia nyata. Penelitian kebijakan publik juga menggunakan berbagai model, seperti model konsekuensi dan dampak serta model proses kebijakan publik.

Para peneliti telah menemukan bahwa pendekatan publik memiliki kepentingan yang sama. Artinya, semua strategi dan upaya pemerintah untuk mengubah keadaan atau memecahkan masalah. Strategi publik di Indonesia

dapat berupa peraturan, undang-undang tidak resmi, pedoman umum, pedoman resmi, pedoman provinsi, pedoman perwakilan pemimpin, pedoman perwakilan kepala daerah, pedoman ketua kota, dan sebagainya. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Kota Surabaya Respon pemerintah terhadap pengelolaan sampah adalah Perda yang merupakan kebijakan pemerintah di tingkat daerah.

Kota Surabaya juga memiliki beberapa kebijakan yang digunakan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan publik yang mempengaruhi perkembangan dunia pemerintahan saat ini juga sangat penting. Isu-isu yang sudah menjadi kebutuhan berusaha untuk dicirikan dan aransemen atau strategi elektif dicari melalui perbincangan oleh para pencipta strategi. Opsi strategi seharusnya memiliki opsi untuk menguji nasib penting secara normatif dan mengukur hasil dari pengaturan yang diusulkan serta mengenali persyaratan yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan. Dalam Yohan, (2021.) menjelaskan bahwa untuk mengatasi masalah publik terkait penanganan masalah sampah, maka para pembuat kebijakan/stake holder

mengambil alternatif melalui pembahasan yang panjang, yaitu :

1. Manajemen Tata Kelola Pembuangan dan pengangkutan sampah
2. Membangun Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
3. Membangun Bank Sampah

Data dikumpulkan dengan menggunakan informasi data dari bidang presentasi dan ditampilkan dalam teks deskriptif tanpa menambahkan fakta. Pemaparan ini dilakukan setelah kondisi lapangan dilonggarkan melalui wawancara dan observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya Mengenai pengelolaan sampah di Kota Surabaya, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurangan sampah di Kota Surabaya, membangun kota yang lebih bersih dan indah dengan menggunakan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di seluruh masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, seiring bertambahnya jumlah orang, jumlah sampah pun bertambah. Untuk mengatasi masalah tersebut, diterbitkanlah Perda Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019.

Peran terpenting dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai salah satu cabang kerja di

lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dengan mandat utama melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kebersihan dan lingkungan. Jadi, dari walikota.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dua topik utama yang perlu mendapat perhatian bersama berdasarkan penelitian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 (Renstra dlh 2016-2021) dan isu-isu potensial dan strategis Kota Surabaya dapat dirumuskan dengan yaitu:

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyusun instruksi untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan acuan atau

pemahaman dasar bagi masyarakat untuk alat dalam mengatur segala sesuatu sesuai dengan kegiatannya untuk melakukan pemberdayaan.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Bukti dari lapangan menunjukkan bahwa penjangkauan masyarakat semakin meningkat untuk memastikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal terlibat secara mendalam dalam pemantauan dan dalam mengelola lingkungan yang ada saat ini. Pengetahuan masyarakat dan kesadaran akan kebersihan lingkungan sebagai dasar pengelolaan lingkungan merupakan upaya penting untuk menjaga keseimbangan sumber daya. (Dari Buku Adipura Dinas Lingkungan Hidup)

2. Pemerintah sebagai penggerak

Peran pemerintah sebagai penggerak adalah menggerakkan partisipasi masyarakat ketika terjadi hambatan dalam proses pembangunan guna mendorong dan mempertahankan momentum pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam memberikan bimbingan dan arahan yang terfokus dan efektif kepada masyarakat. Memberikan bimbingan biasanya dicapai melalui tim pekerja bimbingan atau entitas tertentu yang memberikan pelatihan.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Berlandaskan peningkatan peran serta masyarakat, maka kesadaran, pemahaman dan keterampilan para pelaku ekonomi meningkat dalam hal perijinan dan kepatuhan pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3. rendah. Untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku atau

kegiatan ekonomi, pemerintah harus memantau mereka terhadap catatan lingkungan. Dari agenda kegiatan pemantauan atau pengawasan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya rata-rata terdapat beberapa perusahaan atau kegiatan yang dibatasi Pembuangan limbah cair dibatasi, air atau pembuangan limbah, dan limbah B3. Dari hasil wawancara diketahui bahwa usaha dan kegiatan pada umumnya tidak menggunakan pengelolaan lingkungan. pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas udara, pengelolaan limbah cair.

Tugas yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam kaitannya dengan kebersihan dan lingkungan. Ini mencakup beberapa tugas dan fungsi oleh TUPOKSI yaitu, penyampaian layanan (Regulator), pemantauan dan pengendalian implementasi (Dinamisator) dan pembinaan implementasi (Dinamisator).

Manajemen Layanan (Otoritas Pengawasan). Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memiliki wilayah pelayanan seluas 326,8 km² dengan 31 kecamatan yang terbentang dari utara ke selatan. Volume sampah Kota Surabaya berdasarkan perhitungan berdasarkan jumlah penduduk 2.827.892 jiwa yang setara dengan 700 ton per hari, dengan 79% volume sampah diolah oleh Dinas

Kebersihan dan Lingkungan Hidup dan sisanya 21% dikelola. Di Sini. Oleh pemerintah daerah. Jumlah sampah yang diolah oleh DLH adalah sebagai berikut: Sampah yang dihasilkan di berbagai wilayah Surabaya yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Selatan dan kecamatannya mencapai 700 ton dalam 193 pendistribusian. 6 ton per hari. Saat ini, 213,95 ton sampah yang tidak diolah dibuang oleh badan publik dan swasta setiap hari.

Sampah yang telah diolah akan dibuang di beberapa TPS yang tersebar di Kota Surabaya. Jumlah TPS di Kota Surabaya adalah 306. Kota Surabaya. Berdasarkan ruang lingkup pelayanan jasa sanitasi dan lingkungan dalam pengelolaan sampah di atas, saya ingin mengetahui bagaimana pelayanan dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan pengumpulan sampah, penyuluhan sampah dan pembuangan sampah. Pengelolaan pelayanan ditugaskan oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Kesimpulan

Salah satu kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul Peran Jasa Lingkungan dalam Pengelolaan dan Kebersihan Sampah di Kota Surabaya.

Yang pertama adalah peran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan terkait dengan pelayanan pengumpulan sampah dan pelayanan pengangkutan yang ada saat ini. Beberapa di antaranya belum terlayani dengan baik, namun sudah mampu membahagiakan masyarakat. Selanjutnya, mengenai pengawasan dan pembinaan praktik

1. Peran Jasa Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Dalam rangka memberikan pelayanan terkait dengan pelayanan pengangkutan dan pengumpulan sampah yang ada saat ini, beberapa pelayanan sudah dapat memuaskan masyarakat sekitar, namun belum semuanya terlayani dengan baik.

Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan masih dipandang kurang baik, terbukti dengan tanggapan dari pelapor dan petugas Dinas Lingkungan Hidup. Dimana diperlukan pengawasan dan pembinaan yang cukup untuk membantu masyarakat memahami dan memahami dampak yang dapat ditimbulkan oleh sampah.

2. Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperbaiki masalah pengelolaan sampah di Kota

Surabaya. Saat ini sudah ada prakarsa pemerintah dengan prakarsa jasa lingkungan yang baik dengan mempertimbangkan keinginan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan dengan program 3R.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki masalah pembuangan sampah di Kota Surabaya. Saat ini sudah dilakukan upaya pemerintah dengan inisiatif yang sangat baik dari jasa lingkungan, dengan memperhatikan keinginan untuk lebih meningkatkan kualitas yang baik dan yang bersih. Memperbaiki lingkungan yang terlihat melalui inisiatif jasa lingkungan sendiri dengan membangun tempat pembuangan sampah di daerah yang dianggap sangat padat sampah dan melakukan pengabdian masyarakat terkait pengelolaan sampah di masyarakat sekali atau dua kali sebulan.

Namun sebagai proses sosialisasi masih kurang memadai, dan berdasarkan observasi dan wawancara penulis bahkan ada yang kurang mengetahui sosialisasi pengelolaan sampah, sehingga dari segi proses sosialisasi masih belum

terlaksana dengan maksimal. yang menganggap belum optimalnya sosialisasi pengelolaan sampah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran atau pendapat kepada pihak berwenang terkait peran dan upaya jasa lingkungan pada SWM di Kota Surabaya. Saat ini peran dan komitmen jasa lingkungan dalam pengelolaan sampah belum dapat dipastikan. Beberapa belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan sampah, seperti: S Dalam melakukan kegiatan supervisi, pembinaan, dan kehumasan masih kurang.

1. Kementerian Lingkungan Hidup sebagai wadah untuk memberikan pelayanan, pemantauan dan pembinaan, mendorong pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan, karena partisipasi masyarakat setempat diperlukan untuk mencapai kualitas lingkungan yang baik dalam pengelolaan sampah. membersihkan. Kualitas lingkungan tanpa polusi sampah.

2. Jasa lingkungan lebih proaktif dalam meningkatkan terkait dengan masalah sosialisasi, pengawasan dan pembinaan yang masih dianggap buruk karena tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam praktik pengelolaan sampah, diharapkan

dapat berperan penting. Hasilnya dapat dibuktikan dalam pengelolaan sampah kota Surabaya

Daftar Pustaka

- Hadya, A. M. (2020). *Peran Dinas Kebersihan dalam meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah : Studi deskriptif di Desa Hegarsari 1 kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.*
- Pradana, Z. L., & Nugroho, A. (2018). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA. *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 5(3), 200–207.
<https://doi.org/10.2674/NOVUM.V5I3.36071>
- Salmaa. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya.* Deepublish.
- Yohan, M. (2017). *Analisis Kebijakan Penanganan Sampah.* 2021.